



PKL Malioboro Tetap Minta Relokasi Diundur

Relokasi setidaknya diundur hingga setelah Lebaran Idul Fitri 2022 nanti.

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Pedagang kaki lima (PKL) kawasan Malioboro Yogyakarta tetap meminta agar relokasi diundur. Awalnya, relokasi ini diminta untuk diundur satu tahun sampai tiga tahun.

Namun, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi PKL Yogyakarta (APKLY), Wawan Suhendra mengatakan, relokasi setidaknya diundur hingga setelah Idul Fitri 2022 nanti. Pemda DIY sendiri sudah menetapkan keputusan bahwa relokasi dilakukan 1 Februari 2022.

"Dengan berjalannya waktu akhirnya kami memutuskan hanya minta (penundaan) sampai akhir atau sampai setelah Lebaran. Karena kami sampai Lebaran masih bisa mengais di Malioboro, cuma (minta penundaan) beberapa bulan," kata Wawan di DPRD Kota Yogyakarta, Senin (24/1).

Wawan menuturkan, relokasi yang dilakukan saat ini tergesa-gesa. Meskipun rencana relokasi sudah diketahui sejak 2015, namun pelaksanaan relokasi di masa pandemi Covid-19 ini dinilai tidak pas. "Akhir Desember (2021) kita diundang dan akhir Januari (2022) sudah diminta pindah, sehingga tergesa-gesa. Kondisi saat ini masih pandemi dan ini tidak patut," ujarnya.

Wawan menegaskan, pihaknya tidak menolak relokasi. Namun, PKL keberatan dengan proses relokasi yang dilakukan ketika pemulihan ekonomi akibat terdampak pandemi.

"Kami tidak menolak relokasi, kami menerima dengan keberatan karena situasinya dan momennya tidak pas karena pandemi. Ekonomi kami lumpuh kok mau direlokasi, ini yang jadi alasan kami kenapa kami keberatan," jelas Wawan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) DIY, Srie Nurkyatsiwi

mengatakan, relokasi PKL di sepanjang trotoar Malioboro tidak dilakukan secara mendadak. Hal ini disampaikan Siwi setelah PKL di kawasan Malioboro meminta agar relokasi ini ditunda.

"Sebetulnya ini bukan mendadak, tapi ini kan proses penataan dan proses penataan kawasan Malioboro itu kan sudah lama. Ini bagian dari sisi penataan dan sudah ada targetnya, ditunda sekarang atau besok sama saja, juga prosesnya penataan," kata Siwi kepada *Republika*, Ahad (23/1) malam.

Relokasi PKL ini dilakukan dengan memindahkan ke dua lokasi baru yakni di eks Gedung Bioskop Indra dan eks Gedung Dinas Pariwisata DIY. Siwi menyebut, relokasi ini dilakukan dengan tidak hanya memindahkan PKL dan barang dagangannya.

Namun, ada intervensi dari pemerintah sebagai bagian dalam melakukan penataan di kawasan Malioboro. "Kami juga ada somasi (ke PKL) saat pindah ini (diminta) mundur. Akibatnya kenapa? Kalau jawabannya takut tidak laku (dagangan-

nya), sudah kami sampaikan ada intervensinya supaya laku," ujar Siwi.

Ia menuturkan, ada upaya yang dilakukan agar roda perekonomian PKL tetap berjalan selama berada di lokasi baru. Bahkan, lanjut Siwi, PKL pun tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk retribusi.

"Tidak berbayar, seperti listrik yang ini (sebelumnya) bagian yang sebenarnya mereka (harus) keluarkan (biaya) dan sekarang tidak mereka keluarkan lagi," tambahnya.

Siwi juga menyebut, ada jaminan bahwa pemerintah akan mempromosikan usaha PKL yang direlokasi. Termasuk pembinaan terkait manajemen usaha, mekanisme keuangan dan pemasaran hingga pembinaan bagaimana strategi dalam mendatangkan konsumen.

"Kita bicara soal transformasi digital, bagaimana kita berjualan secara online. Kita terus berbenah, (pemasaran digital) ini harus terus tumbuh, bagaimana sistemnya, bagaimana masyarakat mengenal dan memanfaatkan itu dan itu kita juga terus dampingi," jelas dia.

■ ed : yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005